

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Audit Fee

*Audit fee* didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan oleh auditor atas proses audit yang diserahkan kepada perusahaan. (Gammal, 2012). Dalam menjalankan tugasnya, auditor akan mendapat imbal jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus No 2 tahun 2016 memberikan ketentuan mengenai *audit fee* yang bertuliskan dalam penetapan imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan semua anggota Institut Akuntan Publik Indonesia kepada klien. Dalam hal ini, imbalan jasa yang diberikan kepada auditor tidak boleh terlalu rendah, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman yang memiliki potensi terjadinya ketidaktaatan terhadap kode etik profesi akuntan publik yang berlaku. Menurut De Angelo, (1981) beberapa variabel yang mencakup kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan klien, dan ukuran KAP akan mempengaruhi *audit fee*.

Beberapa hal yang perlu ditetapkan mengenai imbal jasa audit atas *fee audit* :

1. Ruang lingkup klien.
2. Waktu yang dibutuhkan saat mengaudit.
3. Tingkat kompleksitas tugas.
4. Tingkat keahlian serta tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan.

5. Jumlah personel dan seberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya.
6. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

## 2.2. Teori Keagenan

Teori keagenan memiliki hubungan sebagai kontrak, dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan layanan berupa jasa dan mendelegasikan wewenang sebagai pengambilan keputusan. (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori ini, dikemukakan bahwa hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham atau investor (*principal*) disebut dengan teori keagenan. Setiap orang yang menciptakan konflik kepentingan antara agen dengan principal, berada di luar kepentingannya sendiri atau pribadi diasumsikan dalam teori ini. Hal ini sering terjadi dimana pihak manajemen perusahaan (*agent*) memiliki tujuan yang berbeda dengan pihak pemegang saham (*principal*). Adanya masalah yang terjadi diakibatkan konflik kepentingan yang melibatkan pihak agen dan prinsipal ini disebut *agency problem*. Agency Problem adalah suatu keadaan yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal. (Joni Emirzon, 2007).

Masalah yang terjadi dapat menimbulkan tidak meratanya distribusi informasi antara agen dengan prinsipal, informasi asimetri adalah informasi yang tidak seimbang dan akan menimbulkan masalah. Menurut Joni Emirzon (2007) asimetri informasi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah keagenan.

Sulitnya situasi ini dimana prinsipal dalam melakukan control dan memantau perilaku agen, Jensen dan Meckling memaparkan masalahnya :

1. *Moral hazard*, adalah masalah akan terjadi jika agen tidak melakukan hal-hal yang telah disetujui dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, adalah kondisi dimana pihak prinsipal tidak mengetahui terkait dengan keputusan pihak agen yang benar-benar berdasarkan informasi yang diperoleh atau dikarenakan terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Biaya yang harus dipersiapkan untuk menggugung biaya keagenan terkait dengan mengatasi masalah konflik kepentingan dan asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan terdapat tiga biaya agensi, yakni :

- a. Biaya monitoring adalah biaya yang timbul untuk mengamati kegiatan yang dilakukan agen.
- b. Biaya jaminan adalah biaya yang timbul untuk meyakinkan bahwa agen tidak akan bertindak hal yang merugikan pihak prinsipal.
- c. Kerugian residual adalah biaya yang timbul karena nilai uang yang sejajar dengan turunnya kesejahteraan pokok akibat adanya perbedaan kepentingan.

Teori ini tidak lepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak yang independen, sehingga memerlukan biaya yang disebut biaya audit. Dengan demikian akan mempengaruhi penentuan *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adanya peran auditor eksternal yang independen juga menjadi hal

yang penting dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal, dapat dikatakan auditor eksternal merupakan pihak perantara yang meminimalisir terjadinya kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen.

### 2.3. Corporate Governance

*Corporate Governance* memiliki peran penting untuk membuat suatu sistem pada perusahaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 memberi penjelasan *Corporate Governance* merupakan sejumlah aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, kreditor, manajer, karyawan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain di dalam maupun di luar perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban atau sistem yang memegang kendali perusahaan. *Corporate Governance* memiliki tujuan untuk membuat nilai tambah bagi para pemengku kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) dalam *Good Corporate Governance* terdapat lima prinsip yang diperlukan perusahaan supaya membantu perusahaan mencapai tujuan :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan upaya yang dilakukan untuk menunjukkan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dengan akurat dan tepat waktu. Perusahaan juga perlu menjaga keobyektifitasan dalam malakukan bisnis.

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang relevan dan yang mudah dipahami dan dapat diakses bagi *stakeholders*.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai kepentingan bersama, dengan demikian perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Perusahaan perlu melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap manajemen supaya bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tugas tanggungjawabnya terhadap lingkungan sekitar dan kepada masyarakat, sehingga perusahaan dipandang sebagai *good corporate citizen*.

## 4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara mandiri atau independen tanpa adanya campur tangan pihak lain, sehingga dapat menghindari adanya konflik dan masalah.

## 5. Keadilan dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam perusahaan melakukan proses bisnisnya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan bersama, yaitu para *stakeholders* atas dasar kewajaran dan kesetaraan.

### **2.3.1. Dewan Komisaris Independen**

Menurut Egon Zehnder (2000) mendefinisikan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang bertugas sebagai penjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Menurut Wawo (2010) dewan komisaris berperan aktif dalam hal yang bersangkutan dengan kredibilitas perancangan laporan keuangan dan mengawasi sepak terjang pelaksanaan *Good Corporate Governace*.

Dewan komisaris memiliki peran dalam perusahaan dalam bentuk perseroan sebagai pemilik kepentingan dari pemegang saham. Dewan komisaris melakukan pengawasan dalam menjalankan tugasnya pada pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan bertanggungjawab dalam penilaian perkembangan dan pengelolaan perusahaan serta pengendalian internal perusahaan. Adanya komisaris independen telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan dalam suatu perusahaan terdapat persyaratan minimal Komisaris Independen yang wajib dimiliki yaitu sebanyak 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

### **2.4. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan memiliki definisi sebagai suatu skala yang dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, diantaranya yaitu total

aktiva, log size, nilai pasar saham, dll. Jogiyanto, 2013. Menurut Undang-Undang No. 20 2008 ukuran perusahaan diklarifikasikan kedalam empat kategori, yaitu :

1. Usaha mikro, yang merupakan usaha milik orang perorangan atau badan usaha.
2. Usaha kecil, yang merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar.
3. Usaha menengah, merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan, cabang perusahaan usaha kecil maupun usaha besar dengan sejumlah kekayaan tahunannya seperti yang sebagaimana telah diatur dalam UU.
4. Usaha besar, merupakan usaha ekonomi yang dimiliki oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan tahunannya lebih besar dari usaha menengah dan meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 2008, yakni :

**Tabel 2.1.**

**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2.5M
Usaha Menengah	>10 juta – 10M	>2.5M – 50M
Usaha Besar	>10M	>50M

Menurut Jogiyanto (2013) memaparkan bahwa untuk mengukur besarnya perusahaan digunakan ukuran aktiva, ukuran aktiva akan diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Pada umumnya, nilai total aset bernilai lebih besar dibandingkan dengan variabel keuangan lain. Maka dari itu variabel aset diubah menjadi *Log Asset* atau *Ln total Asset*.

$$Size = \ln (Total Asset)$$

## 2.5. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan merupakan hal yang menjadi bagian pertimbangan auditor sebelum melakukan pemeriksaan. Rukmana dkk, 2017. Perusahaan yang mengalami peningkatan yang signifikan dan bisnisnya berkembang dengan baik, perusahaan cenderung mendirikan perluasan bisnis dengan mendirikan anak perusahaan (subsidiary). Menurut Immanuel (2014)



dikatakan bahwa dalam sebuah bisnis, anak perusahaan atau subsidiary merupakan sebuah perusahaan yang digerakkan oleh perusahaan yang lebih tinggi. Perusahaan induk mengendalikan anak perusahaan yang didirikannya itu dikarenakan modal yang dimiliki anak perusahaan merupakan modal milik perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan entitas yang terpisah dan lokasi tempat berdirinya bisnis perusahaan induk dan anak perusahaan tidak harus beroperasi pada lokasi yang sama. (Immanuel, 2014). Dari sinilah dapat terlihat bahwa kompleksitas perusahaan dari banyaknya jumlah anak perusahaan dan cabang perusahaan. Banyaknya jumlah bisnis perusahaan induk, auditor yang mengaudit akan butuh waktu yang lebih lama dan perusahaan yang mempunyai laba yang besar tidak dipungkiri dapat terjadinya salah saji, manipulasi, dan kecurangan sehingga membuat auditor harus lebih cermat, maka dengan demikian *audit fee* yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat. Kompleksitas perusahaan diukur berdasarkan jumlah anak perusahaan.

## **2.6. Risiko Perusahaan**

Risiko perusahaan pada penelitian ini menggunakan proksi rasio *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Kasmir, 2014. Menurut Fahmi (2012) *Leverage* dipakai para kreditor sebagai ukuran yang menggambarkan seberapa banyak jaminan yang tersedia bagi kreditor. Tingginya rasio *leverage* menandakan perusahaan yang kurang *solvable*, karena total asetnya lebih rendah dibandingkan hutang yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah

dapat diartikan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, sedangkan rasio *leverage* yang besar mengartikan bahwa risiko investasi yang besar pula. (Horne, 2005). Manajemen perusahaan beserta para investor sangat terbantu dengan adanya rasio *leverage* atau rasio solvabilitas untuk mengetahui seberapa tingkat rasio struktur modal pada perusahaan tersebut. Kasmir (2012) mengungkapkan bahwa rasio *leverage* mempunyai beberapa jenis yang diantaranya adalah :

- a. *Debt to asset ratio*
- b. *Debt to equity ratio*
- c. *Long term to equity ratio*
- d. *Tangible asset debt coverage*
- e. *Current liabilities to net worth*
- f. *Times interest earned*
- g. *Fixed chared coverage*

Rasio *Debt to asset* digunakan dalam penelitian ini. *Debt to asset ratio* memberikan informasi berupa rasio total utang yang mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang terhadap total aktiva yang terdapat berbagai jenis aktiva. (Kasmir, 2012). Menurut Horne (2012) mengungkapkan bahwa *Debt to asset ratio* adalah perbandingan yang digunakan untuk mengukur antara total utang dengan total aktiva. Dapat dikatakan, seberapa besar utang perusahaan mempengaruhi pengelolaan aktiva atau seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Ketika hasil pengukuran menunjukkan tingginya rasio maka semakin besar perusahaan dibiayai oleh hutang serta memiliki potensi terjadinya perusahaan akan sulit mendapatkan pinjaman tambahan karena bisa jadi perusahaan tidak dapat

menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan hasil yang menunjukkan semakin rendahnya rasio maka semakin kecil perusahaan dibiayai oleh utang Kasmir (2012) mengungkapkan rumus untuk mencari *debt to asset ratio* :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfino dan Siagian (2020) menggunakan pengaruh konsentrasi auditor, independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit sebagai variabel independen dan *fee* audit sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menghasilkan konsentrasi auditor dan komite audit berpengaruh positif terhadap *audit fee*, sedangkan independensi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yaitu 20 perusahaan yang masuk dalam daftar Fact Sheet Index IDX BUMN20 per Desember 2019 periode 2015-2019.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Shafira dan Ghozali (2017) menggunakan pengaruh risiko audit, ukuran perusahaan, dan manajemen laba sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian mengungkap bahwa risiko audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yaitu dengan 33 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ananda dan Triyanto (2019) menggunakan pengaruh fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi audit internal dan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit fee*, sedangkan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yaitu data 25 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Bayuri, Arza, dan Afriyenti (2019) menggunakan pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan kompensasi sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, sedangkan risiko perusahaan dan kompensasi berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yaitu data 18 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Primasari dan Zulaikha (2017) menggunakan pengaruh manajemen laba, ukuran KAP, dan *leverage* sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yaitu dengan 118 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015.

### 2.7.1. Tabel Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2.**

#### Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	Alfino dan Siagian (2020)	<p><b>Variabel Independen :</b></p> <p>X1 = Konsentrasi Auditor</p> <p>X2 = Independensi Dewan Komisaris</p> <p>X3 = Komite Audit</p> <p><b>Variabel Dependen :</b></p> <p>Y = <i>Audit fee</i></p>	<p>Data 20 perusahaan yang masuk dalam daftar Fact Sheet Index IDX BUMN20 per Desember 2019 periode 2015-2019.</p>	<p>Hasil pada variabel Konsentrasi auditor, komite audit berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i>, sedangkan independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i>.</p>
2.	Shafira dan Ghozali (2017)	<p><b>Variabel Independen :</b></p> <p>X1 = Risiko audit</p> <p>X2 = Ukuran perusahaan</p> <p>X3 = Manajemen laba</p> <p><b>Variabel Dependen :</b></p> <p>Y = <i>Audit fee</i></p>	<p>Data 33 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015.</p>	<p>Hasil pada variabel manajemen laba berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i>, sedangkan risiko audit dan ukuran perusahaan</p>

				berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .
3.	Ananda dan Triyanto (2019)	<p><b>Variabel Independen :</b></p> <p>X1 = Pengaruh fungsi audit internal</p> <p>X2 = Risiko perusahaan</p> <p>X3 = Kompleksitas Perusahaan</p> <p><b>Variabel Dependen :</b></p> <p>Y = <i>Audit fee</i></p>	Data perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018.	Hasil variabel fungsi audit internal dan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> , sedangkan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .
4.	Bayuri, Arza, dan Afriyenti (2019)	<p><b>Variabel Independen :</b></p> <p>X1 = Ukuran perusahaan</p> <p>X2 = Risiko perusahaan</p> <p>X3 = Kompensasi</p> <p><b>Variabel Dependen :</b></p> <p>Y = <i>Audit fee</i></p>	Data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 - 2016.	Hasil variabel kompensasi klien berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> , sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .

5.	Primasari dan Zulaikha (2017)	<b>Variabel Independen :</b> X1 = Manajemen Laba X2 = Ukuran KAP X3 = <i>Leverage</i>  <b>Variabel Dependen :</b> Y = <i>Audit Fee</i>	Data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015	118	Hasil variabel manajemen laba dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> , sedangkan variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> .
----	-------------------------------	--	---	-----	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Fee*

Pada teori agensi menguraikan pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *agent* tentang pengelolaan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* membuat pengelolaan perusahaan tidak menjadi satu atau terpisah. *Agency problem* atau masalah keagenan dapat timbul jika terjadinya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Solusi untuk mengatasi masalah keagenan ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan struktur *Good Corporate Governance*.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) menjelaskan bahwa sejumlah aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, kreditor, manajer, karyawan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain di dalam maupun

di luar perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban atau sistem yang memegang kendali perusahaan. Egon Zehnder (2000) mendefinisikan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance yang bertugas sebagai penjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) dalam Good Corporate Governance terdapat lima prinsip yang diperlukan supaya membantu perusahaan mencapai tujuan yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan dan kesetaraan.

Dalam mengatasi adanya kemungkinan terjadinya pertentangan atau perselisihan antara *principal* dan *agent* kehadiran dewan komisaris independen harus dapat melaksanakan tugasnya dalam anggota dewan komisaris secara efektif, sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Menurut Sukrisno dan Cenik (2014) mengatakan bahwa komisaris independen adalah pihak yang dipilih untuk tidak mewakili pihak manapun dan yang dipilih berdasarkan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Maka, dengan dewan komisaris independen melakukan tugasnya, akan tercipta pengawasan yang baik, sehingga reliabilitas dan validitas laporan keuangan yang lebih baik akan dicapai. Hal ini akan mengurangi penaksiran resiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *audit fee* yang lebih rendah.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dewan komisaris independen sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen



pernah dilakukan oleh Alfino dan Siagian (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>A1</sub>: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Audit Fee***

### **2.8.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Banyak pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan jumlah *audit fee* yang sesuai. Basyaib (2007) memberi penjelasan bahwa semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modalnya maka akan mencerminkan ukuran perusahaan tersebut. Menurut Jogiyanto (2013) ukuran perusahaan memiliki definisi sebagai suatu skala yang dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, diantaranya yaitu total aktiva, log size, nilai pasar saham, dll. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Auditor yang melakukan tugasnya pada perusahaan yang besar akan lebih banyak menggunakan waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan proses audit. Hal tersebut akan membuat *audit fee* mengalami peningkatan yang dibebankan pada perusahaan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Shafira dan Ghazali (2017) dan Bayuri, Arza, dan Afriyenti (2019) mengungkapkan hasil bahwa ukuran

perusahaan sama-sama berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>A2</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Audit Fee***

### **2.8.3. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Rukmana dkk (2017) mendefinisikan bahwa kompleksitas perusahaan merupakan hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak perusahaan, cabang perusahaan, dan adanya operasi bisnis di luar negeri. Perusahaan yang mempunyai anak perusahaan akan memiliki tingkat kerumitan yang lebih kompleks dari pada perusahaan tunggal yang tidak memiliki anak perusahaan, karena harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi sehingga membuat kompleksitas bagi auditor yang berkeja akan semakin meningkat dan membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikannya. Semakin kompleks perusahaan yang dimiliki klien semakin banyak pula jumlah auditor yang dipekerjakan sehingga akan menimbulkan peningkatan *audit fee* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kompleksitas perusahaan sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh Ananda dan Triyanto (2019) dengan hasil kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

### **H<sub>A3</sub> : Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *Audit Fee***

#### **2.8.4. Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Risiko perusahaan menggunakan proksi rasio *leverage*. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. (Bambang, 1995). Menurut Horne (2005) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang rendah dapat diartikan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, sedangkan rasio *leverage* yang besar mengartikan bahwa perusahaan memiliki tingkat risiko investasi yang besar pula. Risiko perusahaan merupakan risiko residual yang memiliki arti adanya risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi pada tingkat tertentu. (Bell, 2001). Tingkat risiko perusahaan menjadi salah satu faktor *audit fee*. Pada penelitian ini rasio *leverage* yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio*. Menurut Kasmir (2012) *Debt to asset ratio* memberikan informasi berupa rasio total utang yang mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang terhadap total aktiva yang terdapat berbagai jenis aktiva. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi artinya auditor wajib melaksanakan prosedur audit lebih banyak dari perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang lebih kecil, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas hasil audit yang memiliki dampak pada peningkatan *audit fee*.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel risiko perusahaan dengan proksi rasio *leverage* pada variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh Bayuri, Arza, dan Afriyenti (2019) yang

menunjukkan hasil risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*, sedangkan penelitian terdahulu oleh Shafira dan Ghozali (2017) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap *audit fee*, dan penelitian terdahulu oleh Primasari dan Zulaikha (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>A4</sub> : Risiko perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee***

